



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, Keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2016, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun Anggaran 2016;

14. Peraturan Daerah Kabupaten PenajamPaser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 12);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**dan**  
**BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2016.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.1.493.318.846.997,00 berkurang sejumlah Rp. 41.858.516.803,00 sehingga menjadi Rp. 1.451.460.330.194,00 dengan rincian sebagai berikut :

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah                             |                                |
| a. Semula  | Rp.1.425.616.960.896,00        |
| b. Bertambah/(Berkurang)                         | Rp. <u>1.241.309.958,00</u>    |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan              | Rp.1.426.858.270.854,00        |
| 2. Belanja                                       |                                |
| a. Semula  | Rp.1.493.318.846.997,00        |
| b. Bertambah/(Berkurang)                         | Rp. (41.858.516.803,00)        |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan                 | Rp.1.451.460.330.194,00        |
| Surplus/(Defisit)                                | Rp. (24.602.059.340,00)        |
| 3. Pembiayaan                                    |                                |
| a. Penerimaan                                    |                                |
| 1) Semula  | Rp. 77.701.886.101,00          |
| 2) Bertambah/(berkurang)                         | Rp. <u>(53.099.826.761,00)</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan              | Rp. 24.602.059.340,00          |
| b. Pengeluaran                                   |                                |
| 1) Semula  | Rp. 10.000.000.000,00          |
| 2) Bertambah/(berkurang)                         | Rp. <u>(10.000.000.000,00)</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan             | Rp. 0,00                       |
| c. Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan      | Rp. 24.602.059.340,00          |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | Rp. 00,00                      |

## Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
    - 1) Semula Rp. 73.473.556.896,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 136.009.678.844,00
    - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 209.483.235.740,00
  - b. Dana Perimbangan
    - 1) Semula Rp. 1.117.055.460.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (54.331.484.136,00)
    - Jumlah dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 1.062.723.975.864,00
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
    - 1) Semula Rp. 235.087.944.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (80.436.884.750,00)
    - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 154.651.059.250,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak daerah
    - 1) Semula Rp. 28.129.125.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 134.889.250.000,00
    - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 163.018.375.000,00
  - b. Retribusi Daerah
    - 1) Semula Rp. 4.432.850.896,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.447.179.519,00
    - Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan Rp. 5.880.030.415,00
  - c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
    - 1) Semula Rp. 4.167.000.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (843.380.895,00)
    - Jumlah hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 3.323.619.105,00
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
    - 1) Semula Rp. 36.744.581.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 516.630.220,00
    - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 37.261.211.220,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
    - 1) Semula Rp. 776.300.000.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (107.547.639.136,00)
    - Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 668.752.360.864,00
  - b. Dana alokasi umum
    - 1) Semula Rp. 254.752.550.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
    - Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 254.752.550.000,00

|   |            |                            |
|---|------------|----------------------------|
| c. Dana alokasi khusus  |            |                            |
| 1) Semula   | Rp.        | 86.002.910.000,00          |
| 2) Bertambah/(berkurang)  | <u>Rp.</u> | <u>53.216.155.000,00</u>   |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan  | Rp.        | 139.219.065.000,00         |
| (4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan: |            |                            |
| a. Hibah  |            |                            |
| 1) Semula   | Rp.        | 00,00                      |
| 2) Bertambah/(berkurang)  | <u>Rp.</u> | <u>00,00</u>               |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan   | Rp.        | 00,00                      |
| b. Dana Darurat   |            |                            |
| 1) Semula   | Rp.        | 00,00                      |
| 2) Bertambah/(berkurang)  | <u>Rp.</u> | <u>00,00</u>               |
| Jumlah dana darurat setelah perubahan   | Rp.        | 00,00                      |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi  |            |                            |
| 1) Semula   | Rp.        | 106.296.682.000,00         |
| 2) Bertambah/(berkurang)  | <u>Rp.</u> | <u>(20.458.420.000,00)</u> |
| Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan  | Rp.        | 85.838.262.000,00          |
| d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus  |            |                            |
| 1) Semula   | Rp.        | 72.197.662.000,00          |
| 2) Bertambah/(berkurang)  | <u>Rp.</u> | <u>(50.558.622.000,00)</u> |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus  | Rp.        | 21.639.040.000,00          |
| e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya   |            |                            |
| 1) Semula   | Rp.        | 56.593.600.000,00          |
| 2) Bertambah/(berkurang)  | <u>Rp.</u> | <u>(9.419.842.750,00)</u>  |
| Jumlah bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan                         | Rp.        | 47.173.757.250,00          |

### **Pasal 3**

|  |            |                            |
|--|------------|----------------------------|
| (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:                                |            |                            |
| a. Belanja Tidak Langsung  |            |                            |
| 1) Semula  | Rp.        | 584.297.592.556,00         |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp.</u> | <u>2.360.297.557,00</u>    |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan  | Rp.        | 586.657.890.113,00         |
| b. Belanja Langsung  |            |                            |
| 1) Semula  | Rp.        | 909.021.254.441,00         |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp.</u> | <u>(44.218.814.360,00)</u> |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan  | Rp.        | 864.802.440.081,00         |
| (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja: |            |                            |
| a. Belanja Pegawai   |            |                            |
| 1) Semula  | Rp.        | 467.033.375.722,00         |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp.</u> | <u>(2.602.879.677,00)</u>  |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan   | Rp.        | 464.430.496.045,00         |

|  |            |                            |
|--|------------|----------------------------|
| b. Belanja Bunga   |            |                            |
| 1) Semula  | Rp.        | 0,00                       |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u>                |
| Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan   | Rp.        | 0,00                       |
| c. Belanja subsidi   |            |                            |
| 1) Semula  | Rp.        | 0,00                       |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u>                |
| Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan   | Rp.        | 0,00                       |
| d. Belanja hibah   |            |                            |
| 1) Semula  | Rp.        | 10.195.000.000,00          |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp.</u> | <u>15.616.760.400,00</u>   |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan   | Rp.        | 25.811.760.400,00          |
| e. Belanja Bantuan Sosial  |            |                            |
| 1) Semula  | Rp.        | 00,00                      |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp.</u> | <u>00,00</u>               |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan  | Rp.        | 00,00                      |
| f. Belanja Bagi Hasil  |            |                            |
| 1) Semula  | Rp.        | 0,00                       |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u>                |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan  | Rp.        | 0,00                       |
| g. Belanja Bantuan Keuangan  |            |                            |
| 1) Semula  | Rp.        | 106.069.216.834,00         |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp.</u> | <u>(10.653.583.166,00)</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan  | Rp.        | 95.415.633.668,00          |
| h. Belanja Tidak Terduga   |            |                            |
| 1) Semula  | Rp.        | 1.000.000.000,00           |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp.</u> | <u>00,00</u>               |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan   | Rp.        | 1.000.000.000,00           |
| (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja: |            |                            |
| a. Belanja Pegawai   |            |                            |
| 1) Semula  | Rp.        | 126.814.708.858,00         |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp.</u> | <u>(13.202.147.509,00)</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan   | Rp.        | 113.612.561.349,00         |
| b. Belanja Barang dan Jasa   |            |                            |
| 1) Semula  | Rp.        | 308.086.203.423,00         |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp.</u> | <u>(29.671.092.653,00)</u> |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan   | Rp.        | 278.415.110.770,00         |
| c. Belanja Modal   |            |                            |
| 1) Semula  | Rp.        | 474.120.342.160,00         |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp.</u> | <u>(1.345.574.198,00)</u>  |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan   | Rp.        | 472.774.767.962,00         |

**Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Sejumlah

|                                     |            |                            |
|-------------------------------------|------------|----------------------------|
| 1) Semula                           | Rp.        | 77.701.886.101,00          |
| 2) Bertambah/(berkurang)            | <u>Rp.</u> | <u>(53.099.826.761,00)</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp.        | 24.602.059.340,00          |

b. Pengeluaran sejumlah

|                                      |            |                            |
|--------------------------------------|------------|----------------------------|
| 1) Semula                            | Rp.        | 10.000.000.000,00          |
| 2) Bertambah/(berkurang)             | <u>Rp.</u> | <u>(10.000.000.000,00)</u> |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | Rp.        | 00,00                      |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Silpa tahun sebelumnya sejumlah

|   |            |                            |
|---|------------|----------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp.        | 77.701.886.101,00          |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | <u>Rp.</u> | <u>(53.099.826.761,00)</u> |
| Jumlah Silpa tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp.        | 24.602.059.340,00          |

b. Pencairan dana cadangan sejumlah

|  |            |             |
|--|------------|-------------|
| 1) Semula  | Rp.        | 0,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                         | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan | Rp.        | 0,00        |

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

|  |            |             |
|--|------------|-------------|
| 1) Semula  | Rp.        | 0,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp.        | 0,00        |

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah

|   |            |              |
|---|------------|--------------|
| 1) Semula   | Rp.        | 00,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                            | <u>Rp.</u> | <u>00,00</u> |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | Rp.        | 00,00        |

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah

|  |            |             |
|--|------------|-------------|
| 1) Semula  | Rp.        | 0,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                       | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan | Rp.        | 0,00        |

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah

|  |            |             |
|--|------------|-------------|
| 1) Semula  | Rp.        | 0,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                           | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan | Rp.        | 0,00        |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:

|  |            |                            |
|--|------------|----------------------------|
| a. Pembentukan dana cadangan sejumlah                                    |            |                            |
| 1) Semula  | Rp.        | 0,00                       |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u>                |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan                       | Rp.        | 0,00                       |
| b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah               |            |                            |
| 1) Semula  | Rp.        | 10.000.000.000,00          |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp.</u> | <u>(10.000.000.000,00)</u> |
| Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan             | Rp.        | 00,00                      |
| c. Pembayaran pokok utang sejumlah                                       |            |                            |
| 1) Semula  | Rp.        | 00,00                      |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp.</u> | <u>00,00</u>               |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan | Rp.        | 00,00                      |
| d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah                                    |            |                            |
| 1) Semula  | Rp.        | 00,00                      |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp.</u> | <u>00,00</u>               |
| Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan   | Rp.        | 0,00                       |

### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I : Ringkasan APBD
- Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah
- Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran IX : Daftar perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah; dan
- Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.



**Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
Pada tanggal 5 Desember 2016

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Penajam  
Pada tanggal 5 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**TOHAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2016 NOMOR 2.**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,  
PROVINSIKALIMANTAN TIMUR: 2/107/2016